

1. Buku

Fahmal, Muin. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Yogyakarta: UII Press, 2008.

Hadjon, Philipus M., et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Hartini, Rahayu. *BUMN Persero Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2009.

Kusdarini, Eny. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: UNY Press, 2019.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 2000.

Marbun, SF. dan Moh. Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara Cetakan Keempat*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Pratiwi, Cekli Setya, et al., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: LeIP, 2016,

Purbopranoto, Kuntjoro. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Jilid II*. Bandung: Alumni, 1981.

Rajagukguk, Erman, *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Bentuk Perseroan Terbatas*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2016.

Rajagukguk, Erman. *Butir-butir Hukum Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Ramli, Rizal dkk. *Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Suluh Press, 2014.

Rasdjidi, Lili. *Menggunakan Teori/Konsep dalam analisis di Bidang Hukum, dalam Pembangunan Hukum Bisnis dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional: 70 Tahun Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.*, Bandung: Manda Maju, 2007.

Sinamo, Nomensen. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2008.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Soemarso. *Akuntansi Suatu Pengantar, Edisi Keempat Buku Satu*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1975.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Sudarmanto, Eko, et al., *Good Corporate Governance (GCG)*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Sumardjono, Maria SW. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2021.

Supramono, Gatot. *BUMN Ditinjau dari Segi Hukum Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016).

Wahyuni, Sri. *Pengantar Manajemen Aset*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2020.

Wahyuni, Sri. *Pengantar Manajemen Aset BUMN*. Jakarta: Sopia Timur, 2024.

Wantu, Fence M., *Pengantar ilmu hukum*. Gorontalo: UNG Press, Gorontalo, 2015.

Wibisono, Yusuf. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing, 2007.

Wibowo, Richo Andi, et al., *Kontrak Pemerintah: Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi, dan Kajian Putusan*. Jakarta: Kencana, 2021.

Wibowo, Richo Andi. *Hukum Administrasi Negara, Konsep, Fundamental, Perkembangan Kontemporer, dan Kasus*. Depok: Rajawali Press, 2024.

Yakup, Bahrul Ilmi. *Dekonstruksi dan Reformulasi Hukum BUMN di Indonesia Upaya Menciptakan BUMN Kesejahteraan Rakyat*. Yogyakarta, Genta Publishing, 2020.

Zulmawan, Wawan. *Panduan Praktis Kerjasama Pendayagunaan Aset BUMN*. Jakarta: Aksara, 2013.

Zulmawan, Wawan. *Pendayagunaan Aset BUMN dan Pembentukan Anak Perusahaan*. Jakarta: Permata Aksara, 2014.

Christian, N., Y. Z. Basri, dan W. Arafah, “Analysis of Fraud Triangle, Fraud Diamond and Fraud Pentagon Theory to Detecting Corporate Fraud in Indonesia.” *The International Journal of Business Management and Technology* 3, no. 4 (Juli – Agustus 2019): 73-78.

Christian, Natalis, Arlina, Julie Tryany, dan Vera Laurence Liang, “Analisis Motivasi Fraud dengan Pendekatan Teori Fraud.” *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi* 16, no.1 (Mei 2024): 77-95.

Kurnia Nur Fadilah, “Analisis *Fraud Diamond Theory* dalam Mendeteksi *Financial Statement Fraud*.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8, no. 4 (April 2019): 2-25.

Ghaisani, Hesiya May, Triyono, dan Andy Dwi Bayu Bawono, “Analysis of Financial Statement Fraud: The Vousinas Fraud Hexagon Model Approach and the Audit Committeas Moderating Variable.” *The International Journal of Business Management and Technology* 6, no.6 (November-December 2022): 115-124.

Hartono, Rizky Novian, Sriwati dan Wafia Silvi Dhesinta Rini. “Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin *Business Judgement Rule*.” *Jurnal Sosial dan Humaniora* 2 (1), no. 23-32 (April 2021): 23-32.

Illahi, Zikri et al., “Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Ditinjau dari Rasio Keuangan (Studi Pada PT Telkom Indonesia Tbk).” *Jurnal Aplikasi Bisnis* 21, no.1 (Juni 2024): 570-582.

Pratama, Ade Rifky Yoga, Detak Prapanca, Sriyono. “Return on Asset (ROA), Return on Invesment (ROI), Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Perusahaan Subsektor Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023).” *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 5, no. 2, (2024): 5755-5769.

Putrijanti, Aju, Lapon T. Leonard dan Kartika Widya Utama. “Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).” *Jurnal Mimbar Hukum* 30, no. 2 (Juni 2018): 278-288.

Rianto, R. Edi, “Pendekatan Penilaian Properti untuk Estimasi Nilai Sewa Tanah dan Bangunan PT. KA (Persero) DAOP VI Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 15, no. 3 (2000): 332 – 338.

Roza, Nelva. “Problematika Penentuan Status Keuangan Negara dalam Badan Usaha Milik Negara Persero.” *Jurnal Lex Renaissance* 7 (1), no. 1, (Januari 2022): 41-54.

Sujono, Bambang. “Penilaian Asset dalam Sektor Properti.” *MODUL* 11, no.1 (Januari 2011): 37-40

Sumiyati, Yeti. “Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20, no.3 (Juli 2013): 460-481.

Tupan, J.M., “Analisa Pola Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Preventif Penyulungan 20 KV di PT. PLN (Persero) Area Ambon.” *Jurnal Arika*, 13, no. 2 (Agustus 2019): 87-96.

Wolfe, David T. dan Dana R. Hermanson, “The Fraud Diamond: considering the Four Elements of Fraud.” *CPA Journal* 74, no. 12 (Desember 2004): 38-42.

3. Tesis

Arianto, Dedy. “Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Aset BUMN (Studi Kontrak Pemanfaatan Lahan antara PLN dengan Perum Jasa Tirta II)”, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2019.

Yusmawati, Ambar R. “Penerapan Prinsip Transparansi (Transparency) Sebagai Pelaksanaan dari Good Corporate Governance (GCG) di dalam Kegiatan Pengadaan (Procurement) pada Perusahaan yang Berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.”, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2011.

4. Internet

BPK RI. “IKHTIAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER.” bpk.go.id.
<https://www.bpk.go.id/ihrs> (diakses 3 Desember 2024).

Nursyamsi, Muhammad. “Kementerian BUMN Perlu Petakan Ulang Aset BUMN.” Republika.co.id.
<https://www.republika.co.id/berita/qdps6i383/kementerian-bumn-perlu-petakan-ulang-aset-bumn> (diakses 15 Mei 2023).

Ko Rinaldi Wiranegara, Richo Andi Wibowo S.H., LL.M., Ph.D. – 2020.” kpk.go.id.
Rorotan, DKI Jakarta, Tahun 2019 – 2020.” kpk.go.id.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Didunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
<https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/penanganan-perkara/dugaan-tpk-terkait-pengadaan-tanah-di-rorotan-dki-jakarta-tahun-2019-2020> (diakses 22 Juni 2025).

Komisi Pemberantasan Korupsi. “Kerugian Keuangan Negara Capai Rp223 Miliar, KPK Tetapkan 5 Tersangka Pengadaan Tanah di Rorotan – Jakarta.” kpk.go.id. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kerugian-keuangan-negara-capai-rp223-miliar-kpk-tetapkan-5-tersangka-pengadaan-tanah-di-rorotan-jakarta> (diakses 20 Juni 2025).

Komisi Pemberantasan Korupsi, “KPK Tetap Berwenang Menangani Tindak Pidana Korupsi di BUMN”. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-tetap-berwenang-menangani-tindak-pidana-korupsi-di-bumn> (diakses 19 Agustus 2025).

Susyanto, “Tiga Omnibus Peraturan Menteri BUMN telah Diundangkan.” bumn.go.id. <https://bumn.go.id/publikasi/berita/rilis/detail/tiga-omnibus-peraturan-menteri-bumn-telah-diundangkan-2r> (diakses 4 Desember 2024).

5. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**PENGGUNAAN NILAI PERKIRAAN SENDIRI DALAM KEGIATAN PENDAYAGUNAAN ASET TETAP
BADAN USAHA MILIK NEGARA
DITINJAU DARI ASAS KEWAJARAN DALAM PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR**

**PER-2/MBU/03/2023 TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA DAN KEGIATAN KORPORASI SIGNIFIKAN
BADAN USAHA MILIK
NEGARA**

Te: Rinafdi Wiranegara, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.
Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 262).
Universitas Gadjah Mada, 2025. Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
228/PMK.01/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik.